

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA
PEMBIAYAAN BAGI HASIL *MUDHARABAH* PADA BPRS BANDAR
LAMPUNG**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**NIA AUDINA
NPM: 1651020292**

Prodi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA
PEMBIAYAAN BAGI HASIL *MUDHARABAH* PADA BPRS BANDAR
LAMPUNG**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

**NIA AUDINA
NPM: 1651020292**

Jurusan: Perbankan Syari'ah

**Pembimbing I : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si
Pembimbing II : Dimas Pratomo, S.E.I. M.E**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

Pembiayaan dengan skema bagi hasil merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip untung dan rugi pada usaha yang dijalankan ditanggung bersama antara *sahibul maal* dan *mudharib*. Pembiayaan ini merupakan karakteristik utama yang harus dimiliki setiap Lembaga keuangan Syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada BPRS Bandar Lampung dan menganalisis bagaimana strategi BPRS Bandar Lampung dalam meningkatkan pembiayaan *mudharabah* pada bank tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan populasi seluruh karyawan BPRS Bandar Lampung dengan sampel 33 orang. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, seluruh data dikumpulkan berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa BPRS Bandar Lampung secara garis besar memiliki produk pembiayaan *mudharabah* akan tetapi produk pembiayaan *mudharabah* ini tidak diimplementasikan oleh pihak BPRS Bandar Lampung. Hal ini terjadi karena adanya faktor resiko, prinsip kehati-hatian, non performing financing (NPF), jaminan, kurangnya transparansi antara kedua belah pihak, adanya moral hazard, minimnya edukasi public, banyaknya modal yang dikeluarkan, kurangnya kesadaran dari pihak perbankan, dan pembiayaan *mudharabah* kurang diminati oleh nasabah.

Kata kunci: Pembiayaan, Bagi Hasil, Mudharabah, Bank Syariah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI RENDAHNYA PEMBIAYAAN
BAGI HASIL MUDHARABAH PADA BPRS BANDAR
LAMPUNG**
Nama Mahasiswa : **Nia Audina**
NPM : **1651020292**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)**

MENYETUJUI

untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 1 September 2020

Pembimbing I

Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si
NIP. 196511201992032002

Pembimbing II

Dimas Pratomo, S.E.I., M.E.
NIP. 199305282018011003

Mengetahui

Ketua Prodi Perbankan Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E., Sy
NIP. 198208012011012009



KEMENTRIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Telp: (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUDHARABAH PADA BPRS BANDAR LAMPUNG”**. Disusun oleh: **Nia Audina, NPM: 1651020292**, Jurusan: **Perbankan Syariah**. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada Hari/Tanggal : **Jum'at, 02 Oktober 2020, pukul : 08:00-10:00 WIB.**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua	: Dr. Erike Anggraeini, M.E.Sy	(.....)
Sekretaris	: M. Fikri Nugraha Kholid, M.Pd	(.....)
Penguji I	: M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E, M.Si	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP: 198008012003121001

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.¹



¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2015) cetakan 10, h. 554.

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persambahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mursidi, dan Ibu Nurhayati, yang saya sayangi, hormati, dan saya banggakan. Selalu bekerja keras demi untuk mencapai segala cita-cita yang saya inginkan, merawat, menasehati dengan motivasi yang luar biasa, mendo'akan segala urusanku agar selalu berada di jalan-Nya. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahan di dunia dan akhirat, Aamiin.
2. Kakak-kakak dan adik-adikku tersayang, Eko Saputra, Angga Harianto, Rafi Rizki Aditia, Annisa Rahma dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta menantikan keberhasilanku.
3. Sahabatku tersayang, Repki Yanto, Agus Karsa, Awang Hapison, Tara Dhea Okta, yang tiada hentinya memberikan dukungan, terimakasih selalu menemani dikala penulisan skripsi ini, selalu memberikan motivasi yang luar biasa, dan selalu mendengarkan keluh kesahku disaat berjuang demi skripsi ini, semoga kita dapat sukses bersama, Aamiin.
4. Bapak/ibu dosen yang selama ini telah mendidik dan memberikan ilmunya kepadaku dengan rasa tulus. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa.
5. Almamater tercinta tempat menuntut ilmu-ilmu Rabbani, UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya dan berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Nia Audina dilahirkan di Muara Jaya I, pada tanggal 16 November 1996 yang merupakan anak ketiga dari lima bersaudara pasangan Bapak Mursidi dan Ibu Nurhayati.

Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Pendidikan Sekolah Dasar ditepuh di SD Negeri 01, Muara Jaya I, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2009
2. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2012
3. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2015
4. Kemudian pada tahun 2016 meneruskan pendidikan S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. UIN Raden Intan Lampung pada Prodi Perbankan Syariah.

Bandar Lampung, 1 September 2020

Penulis

NIA AUDINA

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagihasul Akad Mudharabah Pada BPRS Bandar Lampung” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan dan persyarat untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (SI) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) dalam bidang ilmu syariah.

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bunda Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E,M.Si. selaku pembimbingan I dan Bapak Dimas Pratomo, S.E.I. M.E. selaku pembimbing II dan pembimbing

akademik yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
5. Kedua orang tuaku, kakak-kakakku, adik-adikku dan Seluruh keluargaku, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, semoga Allah SWT selalu melimpahkan kebahagiaan serta keberkahan kepada kalian, Aamiin.
6. Pimpinan dan pegawai BPRS Bandar Lampung yang telah memberikan izin informasi dan kerjasamanya dalam pelaksanaan penelitian ini.
7. Sahabat-sahabat tercinta, Tara Dhea Okta, Ayu Safitri, Widya Marlana, Eva Pujianti, Shela Monica yang selama ini menjadi teman terbaik dalam bertukar informasi, berbagi keluh kesah dan keceriaan, serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Wanita-wanita hebatku, Intan Zohro, Dewi Oktaviani, Salis Fitriyanti, Annisa Meilia Putri, Nitya Nur Fadila Gunawan, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, semoga kita sukses bersama, Aamiin.
9. Semua teman-teman angkatan khususnya prodi Perbankan Syariah D angkatan 2016 dan teman-teman KKN 100 yang selalu memberikan semangat serta dukungannya.
10. Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyediakan referensi buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

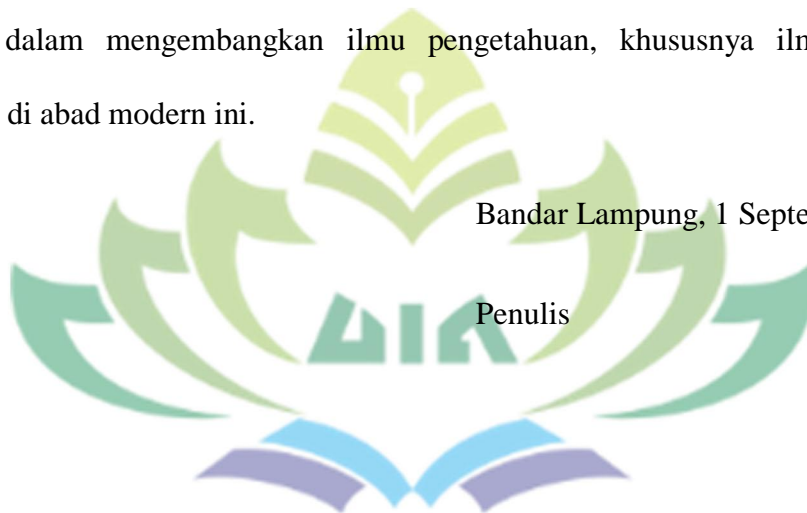
Semua pihak yang tidak disebutkan namanya penulis ucapkan terimakasih banyak semoga apa yang telah kalian berikan menjadi amal soleh dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para akademisi dan pembaca.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi sambungan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman di abad modern ini.

Bandar Lampung, 1 September 2020

Penulis



NIA AUDINA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAM AN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Batasan Masalah.....	13
E. Rumusan Masalah	13
F. Tujuan Penelitian	13
G. Manfaat Penelitian	13
H. Tinjauan Penelitian.....	14
I. Kerangka Teori.....	19
J. Deskripsi Teori.....	20
K. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian dan Sifat	27
2. Sumber Data.....	28

3. Populasi dan Sampel	29
4. Metode Pengumpulan Data	30
5. Metode Pengolahan Data	32
6. Metode Analisis Data	33

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	34
1. Pengertian BPRS	34
2. Tujuan BPRS	35
3. Modal Pendirian BPRS	36
4. Strategi Operasional BPRS	37
5. Kegiatan Usaha dan Produk-Produk BPRS	38
B. Konsep Umum Pembiayaan	40
1. Pengertian Pembiayaan	40
2. Jenis-jenis Pembiayaan	40
3. Manfaat Pembiayaan	44
4. Unsur-unsur Pembiayaan	47
C. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	48
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	48
2. Landasan Syariah Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	50
3. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	55
4. Rukun dan Keuntungan <i>Mudharabah</i>	57
5. Syarat Pokok <i>Mudharabah</i>	60
6. Aplikasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dalam Perbankan	62
D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi hasil <i>Mudharabah</i>	64

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	69
1. Sejarah Berdirinya BPRS Bandar Lampung	69
2. Dasar Hukum Operasional BPRS Bandar Lampung	72
3. Visi dan Misi BPRS Bandar Lampung	75
4. Struktur Organisasi BPRS Bandar Lampung	76
5. Profil BPRS Bandar Lampung	77

6. Produk-produk Pada BPRS Bandar Lampung	77
B. Pembahasan	79
1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BPRS Bandar Lampung.....	89
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BPRS Bandar Lampung	81

BAB IV ANALISI DATA

A. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagihasil <i>Mudharabah</i> Pada BPRS Bandar Lampung	83
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Pertumbuhan jumlah bank dan kantor bank umum syariah	6
2. Pertumbuhan jumlah unit usaha dan kantor unit usaha syariah	6
3. Pertumbuhan jumlah bank pembiayaan syariah.....	7
4. Laporan triwulan bank pembiayaan rakyat Syariah bandar lampung (Dalam Rupiah)	11
5. Pembiayaan berdasarkan jenis akad pada bank Syariah mandiri (dalam bentuk milyar)	12
6. Tinjauan Pustaka.	15
7. Biaya administrasi tabungan	78



DAFTAR GAMBAR

1. Bagan Proses Mudharabah.....	42
2. Bagan Proses Musyarakah	42
3. Skema proses pembiayaan murabahah.....	43
4. Skema salam.....	43
5. Skema Istisna	44
6. Skema Pembiayaan Ijarah.....	44
7. Skema Mudharabah Mutlaqah	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kekeliruan terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah lain ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul Skripsi ini adalah **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagihasil *Mudharabah* pada BPRS Bandar Lampung”**. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. **Analisis** menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)
2. **Faktor** adalah hal keadaan, peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹

¹Adi Gunawan, *Kamus Cerdas Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 2003), h. 25.

3. **Mempengaruhi** adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.²
4. **Rendah** adalah dekat kebawah atau tidak tinggi.³
5. **Pembiayaan** adalah merupakan konsep dan praktik penting dalam perbankan syariah mengingat dari produk pembiayaan inilah yang berhubungan langsung dengan masalah pendanaan kenasabah, yang harapannya pada gilirannya nanti akan mampu mengurangi kemiskinan dan memberi peluang pada terbentuknya lahan-lahan baru lapangan pekerjaan.⁴
6. **Bagihasil** adalah bentuk return dari kontrak investasi, yakni yang termasuk kedalam *natural uncertainty contracts*.
7. **Mudharabah** adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni sipelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung.⁵

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1045.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *kamus versi online/Daring (dalam jaringan)* <https://www.kbbi.web.id/rendah>, 10 september 2019

⁴ Amir Mu'alim, *Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya*, Al-Mawarid Edisi XI Tahun 2004

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 204

8. **Bank adalah** badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama membelikan kredit dan jasa dsalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang.⁶
9. **Bank Syariah adalah** Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya diselesaikan dengan prinsip syariat Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara objektif dan subjektif adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Karena citra pada bank syariah yang membedakan dengan bank konvensional yaitu tentang pembiayaan bagi hasil guna meningkatkan perekonomian umat namun praktiknya masih minim penyaluran dana dengan system bagi hasil (*mudharabah*) dan lebih dominan pada penyaluran sistem jual beli (*murabahah*)

2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis pelajari saat ini, yaitu Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *kamus versi online/Daring (dalam jaringan)* <https://www.kbbi.web.id/bank>, 17 september 2019

- b. Adanya referensi yang mendukung baik primer maupun sekunder dan data penelitian lapangan yang menunjang dalam penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

C. Latar Belakang

Islam sebagai sistem hidup (*way of life*) dan merupakan agama yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya seiring dengan pesatnya kajian ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya mendorong pada terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam.⁷

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya lepas dari peran serta sektor perbankan. Bank pada prinsipnya sebagai lembaga intermediasi, yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana dan menyalurkannya kembali pada masyarakat yang membutuhkan atau yang kekurangan dana.⁸

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 14

⁸ Muhammad, *manajemen pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015), h. 15

banyak.⁹ Sedangkan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.¹⁰

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Alquran dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang peroperasiannya diselesaikan dengan prinsip Syariah Islam.¹¹

Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian kerinduan umat Islam di seluruh dunia bahkan di Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia, yang gencarnya pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, yang di revisi dengan Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem

⁹Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁰Ridwansyah, *mengenal istilah-istilah dalam perbankan syariah*, (bandar Lampung: AURA (Anugrah Utama Raharjo). 2012, hlm 31

¹¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah....*, h. 1

bagi hasil atau bank syariah. Keberadaan bank syariah semakin mapan setelah disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.¹²

Pada saat ini perkembangan jumlah Lembaga Keuangan Syariah semakin meningkat, hal ini menyebabkan persaingan untuk memperebutkan pangsa pasar semakin tajam.¹³

Table 1.1

Pertumbuhan Jumlah bank dan Kantor Bank Umum Syariah

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
					Oktober
Jumlah Bank Umum Syariah	12	13	13	14	14
Jumlah Kantor Bank Umum Syariah	1.990	1.869	1.825	1.875	1.905

sumber : Statistik Perbankan Syariah 2019.¹⁴

Tabel 1.2

Pertumbuhan Jumlah Unit Usaha dan Kantor Unit Usaha Syariah

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
					Oktober
Jumlah Unit Usaha Syariah	22	21	21	20	20
Jumlah Kantor Unit Usaha Syariah	311	332	344	354	376

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2019.¹⁵

¹² Muhammad, *Manajemen dana bank syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 3

¹³ Miss Atiyah Hengdada, *Strategi Pemasaran Produk Murabahah Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Formes Sleman Yogyakarta*. (Skripsi strata satu Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), h 26.

¹⁴ Statistik Perbankan Syaria'h Januari 2019 (Otoritas Jasa Keuangan).

¹⁵ Ibid.,

Tabel 1.3
Pertumbuhan Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019 Oktober
Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	104	95	99	119	161
Jumlah Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	238	287	278	327	405

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2019.¹⁶

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah bank dan jumlah kantor Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan dan penurunan, begitu juga dengan jumlah Unit Usaha Syariah serta Bank Pembiayaan Syariah juga mengalami peningkatan dan penurunan yang relatif normal. Pertumbuhan perbankan syariah diperkirakan masih akan tumbuh baik dilihat dari sisi peningkatan jumlah Bank Umum Syariah yang mengalami peningkatan.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi, antara *surplus spending unit* dengan *deficit spending unit*, memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional dan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah.¹⁷

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Muhammad, *Manajemen dana bank syaria.....*, h. 9

Pada Bank Syari'ah terdapat berbagai jenis pembiayaan yang secara umum terbagi dalam tiga prinsip, yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa, untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan *Ijarah* dan *Ijarah Mutahiyya Biltamlik*; pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan *Murabahab*, *Salam* dan *Istishna*; dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.¹⁸

Al-Mudharabah, berasal dari kata *dharab*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹⁹

Dengan kata lain *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²⁰

¹⁸ Veithzal Rivai dan Arfiyan Arifin, *Islamic Banking Sistem bank isla bukan hanya solusi menghadapi krisis namun solusi dalam menghadapi berbagai persoalan perbankan dan ekonomi global*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.687-688

¹⁹ Muhammad, *manajemen dana bank Syariah....*, h. 238

²⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 41

Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa

DSN. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.²¹

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah SWT telah menyerukan umatnya untuk melakukan perniagaan yang bersifat suka sama suka dan rela sama rela. Hal ini tercantum dalam Qu'ran Surat An-nisa:²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-nisa (4):29)

Pada saat ini sudah banyak bermunculan bank yang sebelumnya merupakan bank konvensional yang memisahkan diri dari induknya baik dengan cara *akuisisi*, *marger*, *konfersi* dan *spin off*. Sama halnya seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung yang sudah memisahkan diri dari induknya yaitu BPRS Sakai Sembayan dengan cara akuisisi.²³

Sejak proses akuisisi dilaksanakan, maka secara operasional Bank Syariah Bandar Lampung diresmikan pada tanggal 22 Desember 2008.

²¹ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 250-253

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2015), hlm.

²³ Ahmad Ifham Sholihin, *Ini Lho Bnak Syariah memahami bank Syariah dengan mudah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015) tersedia dalam *on line* di <https://books.co.id>

Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung memiliki prospek yang sangat menjanjikan dikarenakan di kota Bandar Lampung yakni merupakan satu-satunya BPR yang beroperasi dengan ketentuan sariat Islam.²⁴

Salah satu produk yang di tawarkan di BPRS Bandar Lampung adalah produk *mudharabah*, dan dominannya yang banyak diminati oleh nasabah adalah produk *murabahah*. Produk *mudharabah* pada BPRS Bandar Lampung saat ini terbilang cukup tertinggal dibandingkan dengan akad pembiayaan bagihasil lainnya. Hal ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel. 1.4
Laporan Triwulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Bandar Lampung (Dalam Rupiah)

Indikator	Maret 2018	Juni 2018	September 2018	DesesMBER 2018
Musyarakah	0	0	0	0
Mudharabah	0	0	0	0
Murabahah	27.153.641	28.318.665	26.730.840	27.036.706
Ijarah	0	0	0	0
Qard	0	0	0	55.000

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan.²⁵

Dapat dilihat dari tabel tersebut pembiayaan berbasis bagihasil (*mudharabah*) sangat relatif lebih rendah dari pada pembiayaan *murabahah*. Rendahnya alokasi pembiayaan bagi hasil *mudharabah* tersebut dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*

²⁴ <http://banksyariahbndarlampung.co.id>

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan 2018

menjadi fenomena bagi peneliti untuk meneliti faktor-faktor apakah yang menyebabkan rendahnya pembiayaan bagi hasil *mudharabah*.

Pernyataan tersebut dapat diperkuat dengan adanya beberapa penelitian terdahulu dari penelitian ini adapun data yang didapat dari penelitian terdahulu antara lain:²⁶

Table 1.5
Pembiayaan berdasarkan jenis akad pada Bank Syariah Mandiri
(Dalam Bentuk Milyar)

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Mudharabah	38.660	42.822	41.424	44.979	50.577
Murabahah	46.343	54.564	59.896	61.561	69.696
Musyarakah	38.988	40.105	40.278	47.357	54.052
Qard	3.059	3.411	4.040	4.397	3.883

Perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah harusnya mengurangi pembiayaan yang menggunakan skema *murabahah* (jual beli) dan memperbanyak pembiayaan yang menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). Hal ini guna mengembalikan karakteristik utama lembaga keuangan syariah yaitu pembiayaan yang bersifat bagi hasil.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional Lembaga keuangan Syariah. Sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti sebagai produk inti dari beroprasinya keuangan Syariah.

²⁶ Winda Anggraeni, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Dan Penanganan Permasalahannya* (studi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2017), hlm.7

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagihasil *Mudharabah* Pada BPRS Bandar Lampung**”

D. Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas maka peneliti membatasi masalah dari penelitian ini yaitu Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diperoleh permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagihasil *mudharabah* pada BPRS Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagihasil *mudharabah* pada bank BPRS Bandar Lampung.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulisan tentang analisis faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagihasil *mudharabah* pada BPRS Bandar Lampung.

- b. BPRS Bandar Lampung: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi faktual yang berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada BPRS Bandar Lampung.

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai informasi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Lampung, khususnya mahasiswa/i Jurusan Perbankan Syariah yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
- b. Akademisi: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan yang berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada BPRS Bandar Lampung.

H. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pertumbuhan ekonomi. Perlu disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembandingan dalam penelitian, untuk itu bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian.

Table 1.6
Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Jadul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Erika amelia, Herdiani Eva Fauziah	<i>Determinant Of Mudharabah Financing: a Study at Indonesia Islamic Rural Banking</i>	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.	Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel secara simultan menyeter dana, rasio kecukupan modal, inflasi, nilai tukar dan tingkat bagi hasil secara signifikan mempengaruhi komposisi pembiayaan. Setoran sebagian dana dan nilai tukar berpengaruh positif signifikan, sedangkan rasio kecukupan modal berpengaruh negatif. Inflasi variabel dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap komposisi pembiayaan.
2	Fauziah Md. Taib and T. Ramayah	<i>Factors influencing intention to use diminishing partnership home financing</i>	Desain / metodologi / pendekatan - Data cross sectional dikumpulkan melalui survei dan dianalisis dengan menggunakan analisis faktor, korelasi dan analisis regresi.	Hasil penelitian ini dapat menggunakan dua variabel independen dan nilai-F 479,73 signifikan pada tingkat 0,01. Sikap positif ($b = 0,451$, $p = 0,01$) terkait dengan niat untuk menggunakan dan demikian juga norma subyektif ($b = 0,790$, $p = 0,01$). Dengan demikian, H1 and H2 penelitian ini didukung penuh. Pemeriksaan lebih dekat dari nilai-nilai b menunjukkan bahwa dalam konteks ini norma subyektif adalah prediktor yang lebih berpengaruh dari niat untuk menggunakan dibandingkan dengan sikap.
3	Arinal Rahmati, Deni Mulyadi dan Januddin	<i>Analysis of Low Realization For Mudharabah Financing at Muamalat</i>	Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor minimum realisasi pembiayaan <i>mudharabah</i> disebabkan oleh kesulitan bank dalam memperoleh laporan laba rugi secara akurat, transparan dan rutin. Selain itu, produk <i>mudharabah</i> sangat rentan terhadap terjadinya moral

		<i>Indonesia Bank, Banda Aceh</i>	analisis deskriptif dan hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.	hazard dari pelaku usaha (<i>mudharib</i>) yang cenderung memaksimalkan keuntungan sehingga mengurangi pengembalian ke bank sebagai <i>mal shahibul</i> . Kemudian faktor lain juga dipengaruhi oleh ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil yang berkaitan dengan pengusaha dan kurangnya minat dalam skema pembagian keuntungan dalam kegiatan bisnis
4	Elis Ratna Wulan and Yayat Rahmat Hidayat	<i>Factors That Affect The Demand For Mudharabah Sharia Financing</i>	Model pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi signifikansi faktor-faktor ini adalah model pendekatan regresi.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa margin pembiayaan <i>mudharabah</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan syariah <i>mudharabah</i> , seperti halnya akses ke perbankan syariah. Dengan kata lain, pembiayaan <i>mudharabah</i> dipengaruhi secara simultan oleh dua variabel: margin <i>mudharabah</i> dan akses masyarakat ke perbankan Syariah
5	Agung Yulianto dan Badingatus Solikhah	The Internal Factors of Indonesian ShariaBanking to Predict The Mudharabah Deposits	penelitian ini menggunakan Data sekunder yang dikumpulkan dari Statistik Perbankan Syariah dari situs resmi Bank Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pelanggan untuk menyimpan uang mereka di bank adalah berinvestasi pada instrumen keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pelanggan tidak terlalu memperhatikan faktor-faktor seperti tingkat <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> .
6	Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah	Studi ini mencoba mengidentifikasi faktor-faktor di balik rendahnya volume kontrak mudharabah yang disepakati atau ditandatangani oleh bank-	Hasil penelitian tersebut adalah kebijakan pembiayaan secara umum dalam sebuah perbankan berisi mengenai fitur-fitur pembiayaan yang ada dalam bank tersebut yang sesuai dengan Dewan Syariat Nasional (DSN). Pada umumnya bank sudah menerapkan kebijakan pembiayaan yang pada tempatnya, yaitu pembiayaan yang sesuai

		Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis	bank Isamic pada umumnya dibandingkan dengan <i>Murabahah</i> .	kebutuhan nasabahnya.
7	Agustina Kurniawanti dan Zulfi kar	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Metode analisis yang digunakan adalah SPSS, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil dan kerugian serta total aset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis laba dan bagi hasil, sedangkan dana deposan dan juga pembiayaan bermasalah tidak memiliki pengaruh yang signifikan.	Hasil penelitian tersebut adalah Dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia, tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia, Non performing financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia, dan Total asset berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.
8	Nisa Furqaini dan Rizal Yaya	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia	Menggunakan analisis regresi linier berganda, hasil yang diperoleh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil; pembiayaan bermasalah dan rasio kecukupan modal secara signifikan mempengaruhi volume pembiayaan dan porsi pembiayaan terhadap bagi hasil	Hasil uji parsial menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan dan porsi pembiayaan

Dari referensi diatas telah dijabarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sebagai mana sesuai dengan judul penelitian ini tentang pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan murabahah yang didapat telah dianalisis sebagai berikut:

1. Persamaan

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama membahas atau meneliti tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan mudharabah, atau yang mendekati membahas tentang pembiayaan yang ada di bank Syariah.

2. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang di lakukan adalah dalam penggunaan metode yang digunakan berbagai metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu diantaranya, analisis regresi linier berganda, SPSS, analisis regresi berganda, analisis factor korelasi, sedangkan penelitian yang sedang berlangsung menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling* yang dimana metode ini dianggap cocok untuk menyelesaikan penelitian ini.

Perbedaan selanjutnya terdapat pada tempat penelitian, pada penelitian sebelumnya dilakukannya penelitian di BUS sedangkan penelitian yang sedang berlangsung melakukan penelitian di BPRS Bandar Lampung.

I. Kerangka Teori

Rendahnya pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Bandar Lampung dipengaruhi oleh beberapa faktor ada yang berasal dari BPRS sendiri atau disebut sebagai faktor internal seperti Resiko 100% ada pada bank, jaminan tidak dipersyaratkan pada nasabah dan ada juga yang dari nasabah atau faktor eksternal seperti sulitnya mendapati nasabah yang jujur akan laporan keuangan. Semua variable tersebut termasuk faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan *mudharabah* BPRS Bandar Lampung.

Yang dimaksud dari resiko 100% ada pada bank yakni bank memberikan seluruh modal kepada pengelola dana atau pengelola usaha sedangkan si pengelola hanya menjalankan usaha tersebut tidak berkontribusi atas modal usaha yang dijalankannya. Ketika terjadi kerugian bank ikut berpartisipasi atas kerugian tersebut.

Jaminan tidak dipersyaratkan pada nasabah maksudnya adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* pada bank itu tidak dipersyaratkan untuk mencantumkan surat jaminan dalam bentuk apapun pada bank.

Sulitnya mendapatkan nasabah yang jujur akan laporan keuangan maksudnya bank sulit untuk mendapatkn nasabah yang transparan akan laporan keuangan mengenai usaha yang telah dijalankan.

J. Deskripsi Teori

Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variable yang diteliti. Beberapa jumlah kelompok yang perlu dikemukakan atau deskripsikan, akan tergantung pada luasnya permasalahannya dan secara teknis tergantung pada jumlah variable yang diteliti. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variable-variabel yang diteliti, mulai pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antara variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.²⁷

Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang usaha produknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan usahanya.²⁸

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, kontrak atau akad dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu *Natural Certainty Contracts* dan *Natural Uncertainty Contracts*. *Natural Certainty Contracts* yaitu akad dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang

²⁷ Sugiono, *metode penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 58

²⁸ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004),

dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahanya (*time of delivery*). Jadi kontrak-kontrak ini secara *sunnatullah* menawarkan return yang tetap.

Sedangkan *Natural Uncertainty Contracts* yaitu akad dimana pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko Bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Kontrak investasi ini secara *sunnatullah* akad ini tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.²⁹

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana , bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan

²⁹ Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,....., h. 72-75

pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.³⁰

Pada dasarnya, pembiayaan kerjasama usaha yang dikeluarkan oleh penyalur dana atau bank syariah kepada nasabah merupakan investasi yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah. Bank syariah memercayai nasabah untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Keuntungan atau hasil usaha nasabah atas usaha kerja sama ini akan dibagi antara bank syariah dan nasabah. Bagi hasil merupakan imbalan yang akan diterima oleh bank syariah atas pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan yang menggunakan konsep kerja sama usaha dibedakan menjadi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.³¹

2. Pengertian Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan keuntungan dalam kontrak.³² Disebutkan dalam buku karangan Ismail *mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai

³⁰ Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta; Prenadamedia group, 2011) Edisi Pertama, h. 105

³¹ *Ibid.*, h.173

³² Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 : 40

pengelola usaha, disebut sebagai *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.³³

Secara terminologi, para ulama fiqih mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* merupakan pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan antara kedua belah pihak.³⁴

Dalam pembiayaan *mudharabah* hubungan kontrak tidak hanya antara pemberi modal saja, melainkan antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*entrepreneur/mudharib*).

Mudharib adalah *entrepreneur* yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil usaha yang dilakukan. *Shahiul maal* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya jika usaha yang dijalankan *mudharib* mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal*. Selama kerugian bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*. Jika *mudharib* melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka *mudharib* diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*.³⁵

³³ Ismail, Perbankan Syariah, h.83

³⁴ Nasrun Haroen, Fiqih Mu'amalah, (Jakarta: Gaya Media Permata, 2007), h. 175-176

³⁵ Ismail, Perbankan Syariah, h.84

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *mudharabah*

Ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *mudharabah* ialah:³⁶

a. Standar moral

Standar moral merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kecilnya pembiayaan *mudharabah* selama ini. Karena dengan adanya faktor ini bank tidak bisa dengan leluasa memberikan pembiayaan kepada para *mudharib*.

Muhammad (2005) menyatakan bahwa terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi.

b. Ketidakefektifan pembiayaan *mudharabah*

Ketidakefektifan pembiayaan *mudharabah* juga ditengarai sebagai salah satu faktor rendahnya pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan dari pembiayaan ekonomi kontemporer.

Antonio (2001) mengatakan model pembiayaan *mudharabah* ini bisa menjadi sederhana atau bisa juga menjadi

³⁶ Muhammad Akhyar Adnan, Didi Purwoko, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis*, Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 14 No. 1, halaman: 14-31, Januari 2013.

rumit. *Mudharabah* sederhana terjadi jika terdiri atas dua pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu seorang investor dan seorang usahawan atau pekerja. *Mudharabah* rumit terjadi apabila investornya bisa sebuah kemitraan dan pekerjanya juga bisa sebuah kemitraan.

c. Keterlibatannya perbankan syariah dengan kegiatan usahanya

Hal ini yang akan menyebabkan tidak berkembangnya usaha *mudharabah* tersebut. Dikarenakan para pengusaha tersebut merasa tidak bebas melakukan kegiatan usahanya. Namun di sisi lain bank syariah juga perlu ikut campur, karena dari pihak bank juga ingin mengetahui kegiatan usaha tersebut.

Pihak bank juga harus memperhatikan dari segi biaya yang dikeluarkan oleh bank. Pemberian pinjaman berdasarkan sistem bagihasil/ *mudharabah* ini memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi. Misalnya dengan cara meningkatkan kualitas para pegawainya. Ini akan memerlukan tambahan biaya yang tidak sedikit. Kemudian pihak bank juga perlu menempatkan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengawasi dan mengevaluasi proyek usaha yang sedang berjalan (Muhammad, 2005).

d. Dari segi teknis tentang pembagian hasil keuntungan.

Faktor ini yang menyebabkan pembiayaan *mudharabah* menjadi kurang menguntungkan. Ini disebabkan profesionalitas para pegawai bank tersebut kurang memadai dan kurang ahli dalam

menangani mekanisme bagi hasil. Dari sisi nasabah, adanya ketidakcocokan dalam melaporkan hasil usahanya, baik itu dikarenakan hal yang disengaja atau tidak. Misalnya adanya kecurangan nasabah dalam hal melaporkan keuntungan atau adanya ketidaktahuan para nasabah dalam hal melakukan laporan hasil keuntungan, yaitu dalam hal pencatatan akuntansinya.

e. Pembiayaan *mudharabah* memiliki resiko yang tinggi.

Pembiayaan *mudharabah* memiliki resiko yang tinggi dibanding dengan pembiayaan yang lain seperti *murabahah*. *Mudharabah* ini memiliki resiko yang paling tinggi. Karena dari pihak bank menyerahkan modal kerja tidak dengan disertakan jaminan. Maka dari itu dari pihak bank harus benar-benar teliti dalam hal memilih para *mudharib* yang akan diberi modal kerja.

Neneng (2010) menyatakan adanya risiko yang relatif tinggi terutama pada penerapan produk pembiayaan. Risiko tersebut adalah:

- 1) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

K. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “*Metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “*Logos*” yang artinya atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

Jadi Metodologi Penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman.³⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*), yaitu jenis penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di luar kepustakaan.³⁸ Penelitian lapangan ini dikerjakan dengan mencari atau menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yaitu berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada BPRS Bandar Lampung.

³⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2012), h.1-3.

³⁸Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM 2002), h. 142.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Metode kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁹

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan.⁴⁰ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data atau informasi langsung dari pimpinan dan pegawai BPRS Bandar Lampung yang diperoleh dari melakukan wawancara dengan responden.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,, h. 7

⁴⁰ Nur Indrianto, Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: bpfe, 2009), h. 146.

b. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)⁴¹ seperti dari sumber bacaan yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan materi yang sedang peneliti lakukan seperti, literatur, buku-buku, jurnal penelitian ataupun artikel-artikel.

Dalam penelitian ini beberapa data dan dokumentasi yang dibutuhkan dalam penyajian data dan penelitian, misalnya berupa gambaran umum bagaimana situasi atau keadaan yang ada di Bandar Lampung dan data-data lainnya. Data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini diperoleh dari berbagai instansi seperti Statistik Perbankan Syariah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴² Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek

⁴¹*Ibid*, h. 147.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ..., h. 8

tersebut.⁴³ Dalam penelitian ini yang dimaksud dari populasi adalah pegawai BPRS Bandar Lampung yang berjumlah 33 orang. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan pegawai BPRS Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu objek atau subjek yang mewakili populasi. Adapun pengambilan harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau membuat kriteria tertentu sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Penentuan sampel dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Penambahan sampel akan dihentikan ketika datanya sudah jenuh. Maksudnya, dari berbagai informan baik yang lama maupun yang baru, tidak memberikan data baru lagi.⁴⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut:

⁴³ *Ibid*, h. 79.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif,*, h.

a. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung, dalam artian peneliti langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.⁴⁵ Dimana peneliti mengamati dan mencatat fenomena-fenomena yang ada di BPRS Bandar Lampung.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴⁶ Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*Interview*) bebas terpimpin yaitu kombinasi anatar wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteleti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman *interview* berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara Bandar Lampung, untuk memperoleh data tentang Faktor-faktor pembiayaan bagihasil (*Mudharabah*).

⁴⁵Ibid, *Sugiyono*, h. 145.

⁴⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*,....., 105

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.⁴⁷ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang berupa catatan, arsip dan sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada BPRS Bandar Lampung. Serta dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan penulis berupa arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku tentang teori faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada BPRS Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

Menurut Kartini Kartono pengolahan data berarti menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati dan relevan yang tepat, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.⁴⁸

Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu diedit untuk mendapatkan data yang sempurna, lengkap, dan valid. Selanjutnya data dikumpulkan, diseleksi dan

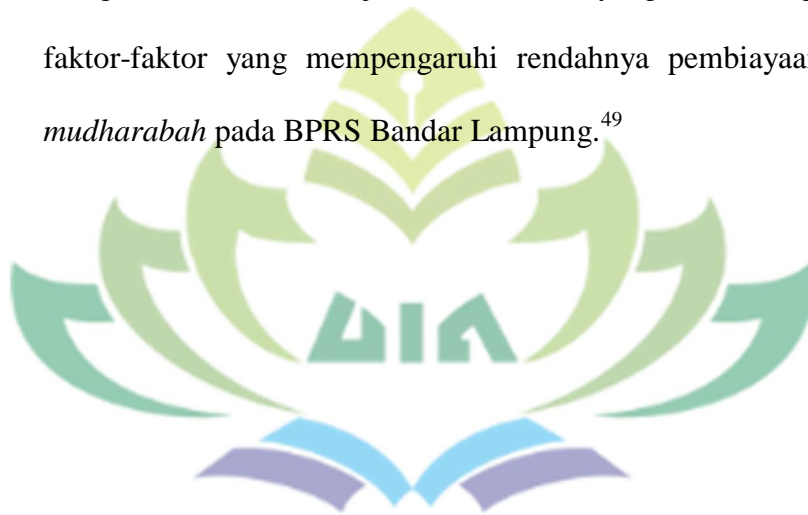
⁴⁷Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Jakarta: Gajah Mada Universitas press, 1998), h. 105

⁴⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung, Alumni, 1998), h. 78

diklasifikasikan serta disusun secara sistematis sesuai dengan kelompok-kelompok pembahasan terhadap permasalahan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data diatas. Dari semua data yang terkumpul, kemudian peneliti analisis dengan menggunakan metode deskripsi, dengan analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena. Dalam hal ini peneliti menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada BPRS Bandar Lampung.⁴⁹



⁴⁹Masyuri dan Zainudin, *Metode Penelitian Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Adutama, 2008), h. 13.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdirinya Lembaga keuangan syariah selain didasari oleh tuntutan bermasalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam, juga sebagai langkah aktif dalam rangka aktif restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate interest*) yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga. Menurut Undang-undang Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu Lembaga keuangan yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran, serta beroprasional berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.⁵⁰

1. Pengertian BPRS

BPRS aadalah salah satu Lembaga keuangan perbankan Syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau muamalah Islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (Butir empat) UU No. 10

⁵⁰ Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistik) (Online), tersedia: [http://www.bi.go.id/UU No.21 Tahun 2008](http://www.bi.go.id/UU%20No.21%20Tahun%202008)

Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 07 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵¹

Adanya BPRS merupakan tuntunan bermuamalah, dimana bank pembiayaan rakyat Syariah juga beroperasi layaknya bank-bank Syariah lainnya juga melakukan penghimpunan dan penyaluran dan kepada masyarakat luas. Hanya saja bank pembiayaan rakyat Syariah tidak ikut serta dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti tidak melayani.

2. Tujuan BPRS

Setiap Lembaga baik Lembaga keuangan atau bukan Lembaga keuangan memiliki suatu tujuan operasional. Adapun tujuan operasional, akan memberikan gambaran bagi perusahaan mengenai prospek ke depan seperti apa yang dicapai. Adapun yang menjadi tujuan operasional BPRS adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan, sehingga mengurangi arus urbanisasi.

⁵¹ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 38

- c. Membina Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

3. Modal Pendirian BPRS

Untuk mendirikan Banl Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) modal yang disetor menurut PBI Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang BPRS Ditetapkan sekurang-kurangnya:⁵²

- a. Rp2.000.000.000-, (dua milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan diwilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi.
- b. Rp1.000.000.000-, (satu milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan diwilayah ibu kota provinsi diluar wilayaah tersebut di atas, dan
- c. Rp500.000.000-, (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan diluar wilayah pada huruf a dan b.

Menurut PBI Nomor 11/23/PBI/2009 Pasal 5, BPRS hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah, atau dua belah pihak atau lebih dari pihak-pihak tersebut diatas.

Perubahan modal dasar bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas atau perusahaan daerah wajib dilaporkan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal diterimanya

⁵² Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.

persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang disertai dengan Rapat Umum Pemegang Saham akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.

Menurut Pasal 2 PBI Nomor 11/23/PBI/2009 bentuk hukum suatu bank dapat berupa perseroan, koperasi, atau perusahaan daerah. Pasal 3 menjelaskan, bahwa bank hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia dalam dua tahap: (a) persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan mendirikan bank dan (b) izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan.⁵³

4. Strategi Operasional BPRS

Upaya mencapai tujuan operasional BPRS tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

- a. BPRS tidak menunggu atau pasif terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan solisitas/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- b. BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.

⁵³<http://www.bi.go.id/UU/No.21/Tahun2008.htm> (08 Juli 2017)

- c. BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberikan pembiayaan.⁵⁴

Strategi BPRS berusaha tidak menunggu nasabah untuk datang ke BPRS umum BPRS berusaha mendekati masyarakat, dengan berbagai cara seperti *survey* ke lokasi-lokasi usaha masyarakat yang kecil yang masih perlu pengembangan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dari pada adanya sebuah lembaga keuangan seperti BPRS. Upaya yang dilakukan BPRS ini adalah salah satu upaya yang dapat membantu program pemerintah yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia.

5. Kegiatan Usaha dan Produk-produk BPRS

a. Kegiatan usaha

Menurut Pasal 21 Undang-undang Perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:⁵⁵

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah; dan
 - b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad

⁵⁴ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 129

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Edisi Pertama, Kencana, 2014), h.

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;

- 2) Menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk:
 - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *istihna*;
 - c) Pembiayaan berdasarkan akad *qard*;
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa-beli dengan akad *ijarah mutahiya bitamblik*; dan
 - e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- 3) Menempatkan dana pada bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dalam bentuk akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- 4) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah; dan
- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

b. Kegiatan yang dilarang

Berdasarkan PBI Nomor 15/11/PBI/2013 Tentang Prinsip Kehatian dalam kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan BPRS adalah:

- 1) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing.
- 3) Melakukan penyertaan modal.
- 4) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008

B. Konsep Umum Pembiayaan

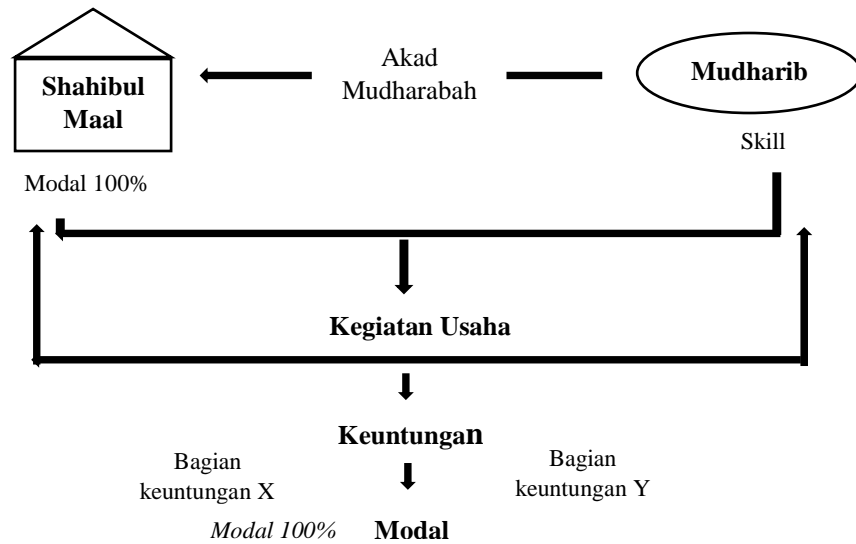
1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

2. Jenis-jenis Pembiayaan

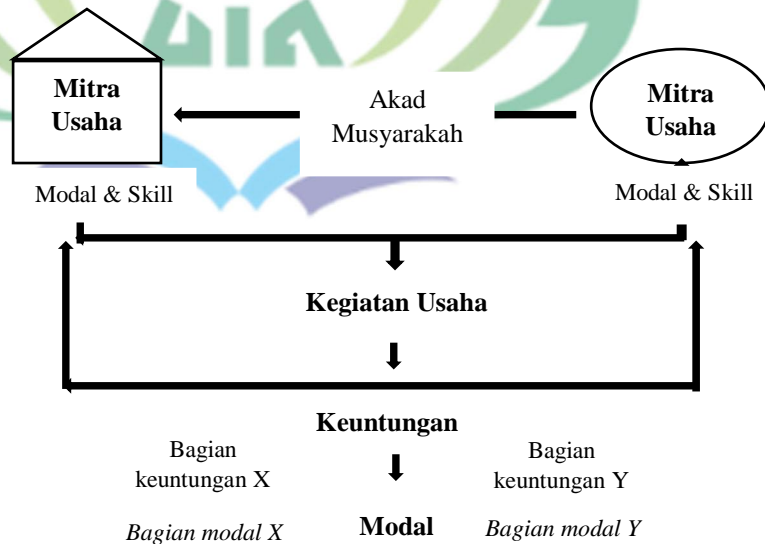
- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Gambar: 2.1 Bagan Proses Mudharabah



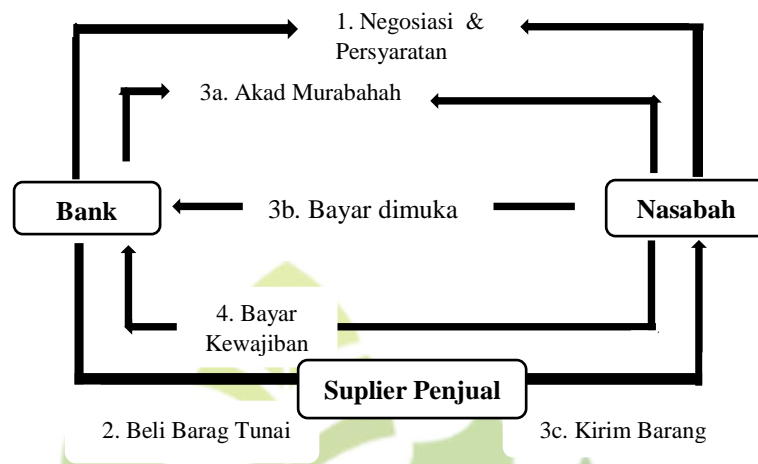
- b. Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian antara para pemilik dana untuk mencampurkan dananya pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian antara pemilik dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Gambar: 2.2 Bagan Proses Musyarakah



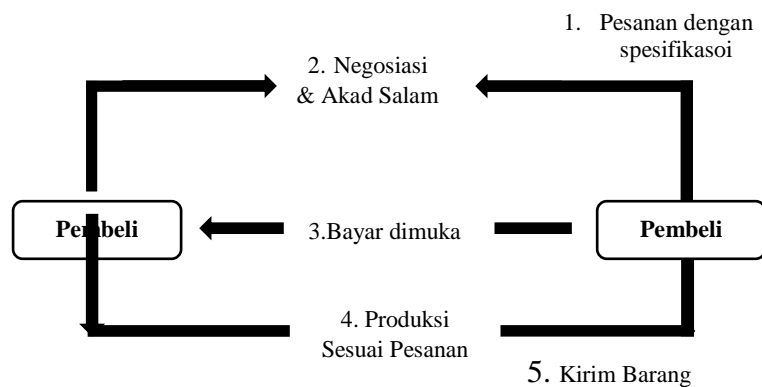
- c. Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian antara bank dan nasabah dimana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah lalu kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang disepakati antara bank dan nasabah.

Gambar: 2.3 Skema Proses Pembiayaan Murabahah



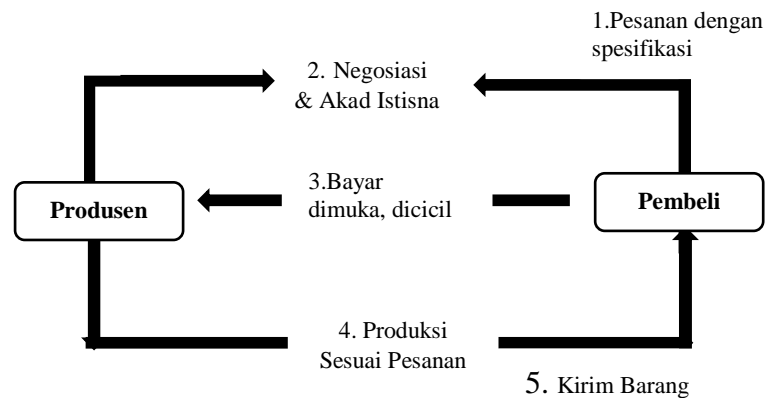
- d. Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga lebih dahulu

Gambar: 2.4 Skema Salam



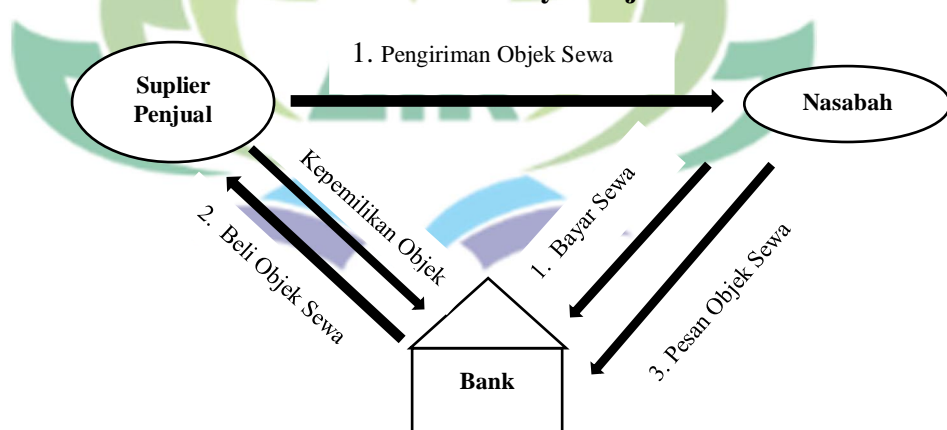
- e. Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

Gambar: 2.5 Skema Istisna



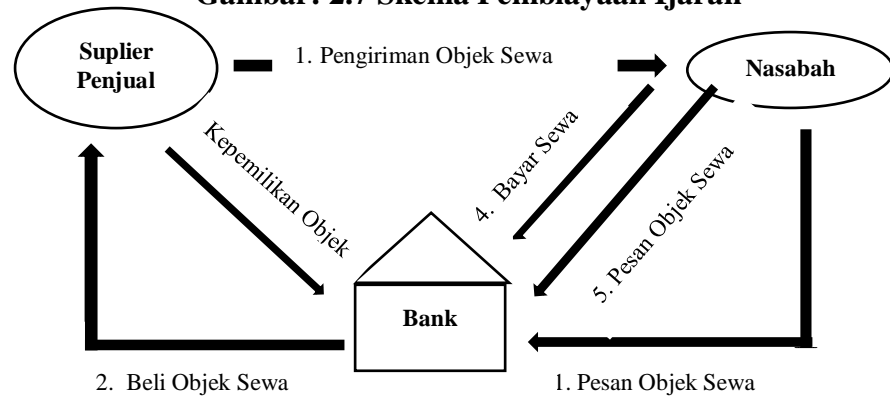
- f. Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa

Gambar: 2.6 Skema Pembiayaan Ijarah



- g. Pembiayaan *ijarah mutahiya biltamlik* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhir dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

Gambar: 2.7 Skema Pembiayaan Ijarah



3. Manfaat pembiayaan

Beberapa atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah kepada mitra usaha antara lain:⁵⁶

a. Manfaat pembiayaan bagi bank

- 1) Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan dapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank Syariah dan nasabah.
- 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan produktifitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
- 3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank Syariah lainnya seperti dana dan jasa. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah, secara

⁵⁶ Ismail, *perbankan Syariah*, (Jakarta: PT charisma Putra Utama, 2016), h. 110-112

tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.

- 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara terinci aktifitas usaha para nasabah diberbagai sector usaha.

b. Manfaat pembiayaan bagi debitur

- 1) Meningkatkan usaha nasabah, pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- 2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank Syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.
- 3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- 4) Bank dapat memberikan fasilitas lainya pada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah* dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
- 5) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya sehingga nasabah dapat mengestimasi keuanganya dengan tepat.

c. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah

- 1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor real, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan pada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, akan meningkatkan produksinya, sehingga peningkatan produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional.
- 2) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang dimasyarakat terbatas. Pemberian pembiayaan ini dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat akan bertambah sehingga arus sekarang juga bertambah sebaliknya juga dalam hal peredaran uang di masyarakat meningkat, maka pemberian pembiayaan dibatasi, sehingga peredaran uang dimasyarakat dapat dikendalikan, sehingga nilai uang dapat stabil.
- 3) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja terjadi karena nasabah yang mendapat pembiayaan terutama

pembiayaan investasi atau modal kerja yang tujuannya adalah untuk meningkatkan volume usaha, intinya akan menyerap jumlah tenaga kerja. Penyerapan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya secara total akan meningkatkan pendapatan nasional.

- 4) Secara tidak langsung pembiayaan bank Syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak yaitu antara lain; pajak pendapatan dari bank Syariah, dan pajak pendapatan dari nasabah.

4. Unsur-unsur Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Sehingga jika berbicara tentang pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang ada didalamnya, yang meliputi:⁵⁷

- a. Kepercayaan, yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Kesepakatan, yaitu kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangi hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu bank dengan nasabah.

⁵⁷ Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syariah Dari PT teori ke Praktek*,....., h. 160

- c. Jangka waktu, yaitu setiap pembiayaan yang diberikan yaitu mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Semua pembiayaan pasti memiliki jangka waktu.
- d. Risiko, yaitu dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan atau nasabah bank, tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bias mendapat kerugian seperti ketika terjadi *side striming*, lalai dan kesalahan yang disengajamaupun menyembunyikan keuntungan oleh nasabah.
- e. Balas jasa yaitu keuntuanga yang diberikan atas pemberian pembiayaan atau jasa yang dikenal dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan baya administrasi yaitu merupakan keuntungan bank.

C. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Al-mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, maka sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.⁵⁸

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh usmani (1999), adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, ke ikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, resiko keuntungan untuk masing-masing pihak yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

⁵⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,....., h.237

⁵⁹ Ascaria, *akad dan produk bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.

2. Landasan Syariah

a. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *mudharabah*, adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa:29)*

b. Al-hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ دَفَعَ
إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَ ضَبَا عَلَى أَنَّ يَعْتَمِلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَطْرُ ثَمَرِهَا

Artinya: *“Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan lading daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya.”*
(HR. Muslim 4048).

c. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang *Mudharabah*

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *Mudharabah* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *mudharabah*.

Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah* Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah)

melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- a. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*),

kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

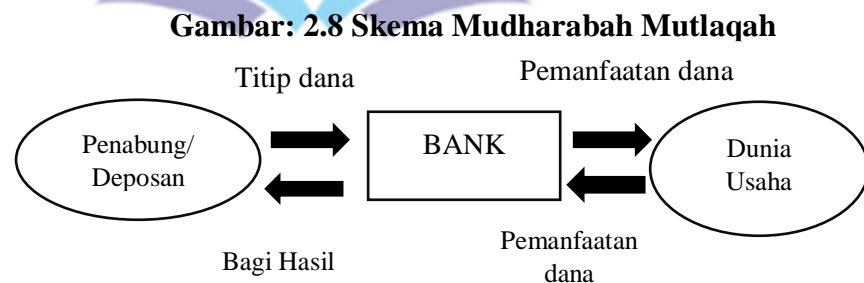
3. Jenis-jenis Mudharabah

a. *Mudharabah Mutlaqah*

- 1) *Shahul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya mudharib diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis layanannya.

- 2) Aplikasi yang sesuai dengan akad ini adalah time deposit biasa.

Skema *mudharabah mutlaqah* dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam skema *mudharabah mutlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship costumers* pada bank konvensional.

- 1) Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukannya *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.
- 2) Bank memiliki dua fungsi kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dengan demikian baik kekiri maupun kekanan bank harus *sharing risk* dan *return*.
- 3) Dunia usaha berfungsi sebagai penggunaan dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah penggunaan dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, dan *fee beads service*.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

- 1) *Shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bias mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh

shahibul maal. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain.

- 2) Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah *special investment*.

Special investment melalui *mudharabah muqayyadah*.

4. Rukun dan Ketentuan *Mudharabah*

Adapun unsur dan rukun perjanjian *mudharabah* tersebut adalah:⁶⁰

- a. *Ijab* dan *Qabul*, pernyataan kehendak yang berupa *ijab* dan *qabul* antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat yaitu

- 1) *Ijab* dan *qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Dalam menjelaskan maksud tersebut bias menggunakan kata *mudharabah*, *qiradl*, *muqaradah*, *muamalah* atau semua kata yang semakna dengannya. Bias pula tidak menyebutkan kata *mudharabah* dan kata-kata sepadan lainnya, jika maksud dari penawaran tersebut sudah dapat dipahami.

- 2) *Ijab* dan *qabul* harus bertemuartinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya *ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya bekerjasama. Ungkapan kesedian itu bias di ungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (*isyarat*) lain yang menunjukkan kesediaan.

⁶⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,....., h. 238-242

b. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha) para pihak *shahib al-mal* dan *mudharib* disyaratkan

1) Cakap bertindak hukum secara syar'i. artinya *shahib al-mal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola. Jadi, *mudharabah* yang disepakati oleh *shahib al-mal* yang mempunyai penyakit gila temporer tidaklah sah, namun jika dikuasakan oleh orang lain maka sah. Bagi *mudharib*, asalkan ia memahami maksud kontrak saja sudah cukup sah *mudharabah*-nya.

2) Mewakili wilayah *al-takwil wa al-wakalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberi kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan satu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.

c. Adanya modal, adapun modal disyaratkan

1) Modal harus jelas jumlah dan jumlahnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlahnya.

2) Harus berupa uang bukan barang. Mengenai modal harus berupa uang bukan barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan *mudharabah* dengan barang itu dapat menimbulkan kesamaran. Karena barang itu bersifat fluktuatif.

Sedangkan jika barang tersebut tidak bersifat fluktuatif seperti emas dan perak, mereka berbeda pendapat.

- 3) Uang bersifat tunai bukan utang. Mengenai keharusan uang dalam bentuk tunai buatkan utang bentuknya adalah misalnya *shahib al mal* memiliki piutang kepada seorang tertentu, piutang kepada seseorang tersebut kemudian dijadikan modal *mudharabah* bersama si berutang. Ini tidak dibenarkan Karena piutang itu sebelum diterima oleh si berutang kepada si berpiutang masih merupakan milik si berutang.
- d. Adanya usaha (*al-‘aml*). Dalam menjalankan usaha ini *shahib al-mal* tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh membatasi kegiatan usaha *mudharib* sedemikian rupa sehingga mengakibatkan mengakibatkan upaya memperoleh keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi dilain pihak pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan Syariah secara umum.
- e. Adanya keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa
 - 1) Keuntungan tidak boleh dihitung dari persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini penghitung harus dilakukan secara cermat. setiap keadaan yang membuat ketidak jelasan perhitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah.

- 2) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta, dan seterusnya. Karena jika ditentukan dengan jumlah nominal maka *shahib al-mal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya. Ini akan membawa pada perbuatan riba.
- 3) Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase misalnya 60:40%, 50:50% dan seterusnya. Penentuan persentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Artinya jika nisbah tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama. karena aturan umum dalam perhitungan ini adalah kesamaan.
- 4) Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.

5. Syarat Pokok *Mudharabah*

Menurut para ahli hukum Islam dalam kesepakatan yang bulat menyatakan bahwa *mudharabah* adalah sah dan diperolehkan islam dengan memenuhi persyaratan berikut:⁶¹

- a. Jika dua orang atau lebih dengan tanpa tekanan atas kehendak mereka, mengadakan suatu kesepakatan dimana salah seorang

⁶¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003), h. 383

memberikan jumlah modal kepada orang lain yang mengelola modal tersebut dalam bidang komersial dan sebagainya untuk mencari keuntungan yang bermanfaat bagi kemitraan tersebut

- b. Setiap pihak mengetahui secara pasti tanpa adanya keraguan seberapa bagian keuntungan total dan tidak dengan jumlah tertentu dengan standar jumlah uang atau lentaka emas atau perak. jika terjadi kerugian maka *mudharib* tidak akan menerima apapun sebagai imbalan kerjanya, dan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. dan apabila tidak terjadi kerugian serta tidak memperoleh keuntungan, *mudharib* tidak menerima apa-apa atas jasanya.
- c. Modal dipegang oleh pihak lain misalnya manajer untuk tujuan *mudharabah*.
- d. *Mudharib* secara bebas sepenuhnya untuk berdagang dengan modal yang dipercayakan kepadanya dengan cara-cara yang ia anggap paling baik dan mengambil langkah langkah yang ia anggap perlu serta tetap untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Berbagai persyaratan yang membarasi kebebasannya menjadikan kontrak ini tidak sah.
- e. Adanya consensus pendapatan bahwa *mudharabah* tidak hanya terbatas pada perdagangan ssaja, tetapi mempunyai terapan yang lebih luas, *mudharabah* dapat digunakan untuk mengatasi berbagai jenis hasil keuntungan perdagangan atau bisnis yang dilakukan

dengan melibatkan atau industri, karena industri merupakan suatu jenis perdagangan dan tidak melanggar persyaratan *mudharabah*.

- f. Lamanya berkemitraan tidak tentu dan tidak terbatas tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kemitraan dengan memberitahukan pihak lainnya.
- g. Hak untuk semua pihak menentukan jangka Panjang kemitraan sesuai dengan yang diinginkan dapat merumuskan bisnis dan harus dibatasi dengan jangka waktu yang pasti setelah mengadakan kesepakatan kemitraan.

6. Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Perbankan

Penetapan di bank Syariah dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun syirkah atau kerja sama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli (*bai' bittaman ajil dan murabahah*), maka bank akan mendapatkan margin keuntungan. Pembiayaan tidak begitu rumit. Namun jika pembiayaan dengan akad syirkah (*musyarakah dan mudharabah*), maka pembiayaan ini membutuhkan hitungan-perhitungan yang cukup susah.

Dalam pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak yaitu: (a) Nisbah bagi hasil yang disepakati, (b) Tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu bank sebagai pihak yang memiliki dana akan

melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.⁶²

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendapatan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada.⁶³

a. Tabungan berjangka

Tabungan berjangka adalah tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.

b. Deposito special (*Special investmen*)

Deposito special (*Special investmen*) adalah dimana dana yang ditiptkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya, *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, merupakan dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Modal kerja yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah modal kerja bersih yang dimiliki. Modal kerja bersih atau disebut juga dengan net working capital adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar.

⁶² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,....., h. 244-245

⁶³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*,....., h. 97

- b. Investasi khusus, disebutkan juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan teori perbankan Syariah kontemporer, prinsip *mudharabah* dijadikan sebagai alternative penerapan system bagi hasil. Meskipun demikian, dalam praktiknya, ternyata signifikansi dalam memainkan oprasional investasi dana bank perannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamatan perbankan Syariah, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya:⁶⁴

1. Standar Moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang dikebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih insentif untuk setiap investasi yang diberikan. Yang demikian itu membuat oprasional perbankan berjalan tidak ekonomi dan tidak efisien. Berdasarkan alasan ini bank-bank Syariah menggunakan pembiayaan bagi hasil yang diberikan setelah mmelakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan, dana hanya akan diberikan kepada rekan (mitra) yang

⁶⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,....., hlm. 250-252

efisien dalam mengelola bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, profit usaha yang dijalankan adalah *profitable*, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek.

2. Ketidakefektifan modal pembiayaan bagi hasil

Pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang diterapkan dalam bentuk *mudharabah* maupun *musyarakah* merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan ke dalam pembiayaan institusional menjadi terhambat. Berbagai masalah yang berkaitan dengan aplikasinya membuat prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* pada tingkat pembiayaan institusional benar-benar tidak dapat diterapkan. Diantara alasannya adalah meningkatkan permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran belanja. Dengan demikian permintaan pemakaian pembiayaan dengan sistem bagi hasil menjadi tidak terpenuhi.

3. Berkaitan dengan para pengusaha

Keterkaitan bank dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung dari pada sistem lainnya pada bank konvensional. Bank Syariah memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktifitas bisnis yang dibiayai dan kemungkinan lebih besar pihak bank turut

mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisilain keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menurut kebebasan yang luas dari pada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.

4. Dari segi biaya

Pemberian pembiayaan dalam system bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank Syariah kemungkinan besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dijamin untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli dari pada teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga revisi kinerja perbankannya yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap pemakaian dana tersebut. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para banker yang digunakan untuk menjaga efektifitas oprasional perbankan Syariah kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang ditanggung oleh mitra ketika mengembalikan dana pinjaman bagi hasil.

5. Segi teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan system bagi hasil tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah, perhitungan keuntungan. Pada satu sisi dari bank Syariah sendiri, profesionalitas

pegawai pada saat ini kurang memadai dari segi keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan mekanisme bagi hasil. Disisi lain dengan menggunakan system bagi hasil, bank membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktifitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha.

Dari sisi nasabah, kebutuhuran masih menyelimuti masyarakat dunia muslim. Hal demikian akan menyulitkan dalam pembuatan catatan akuntansi secara rinci. Pada saat ini sangat penting untuk transaksi bagi hasil. Perhitungan keuntungan dalam system bagi hasil juga mengalami kesulitan untuk diterapkan. Karena system bagi hasil perhitungan keuntungannya harus mengikuti yang terjadi secara actual dalam bisnis.

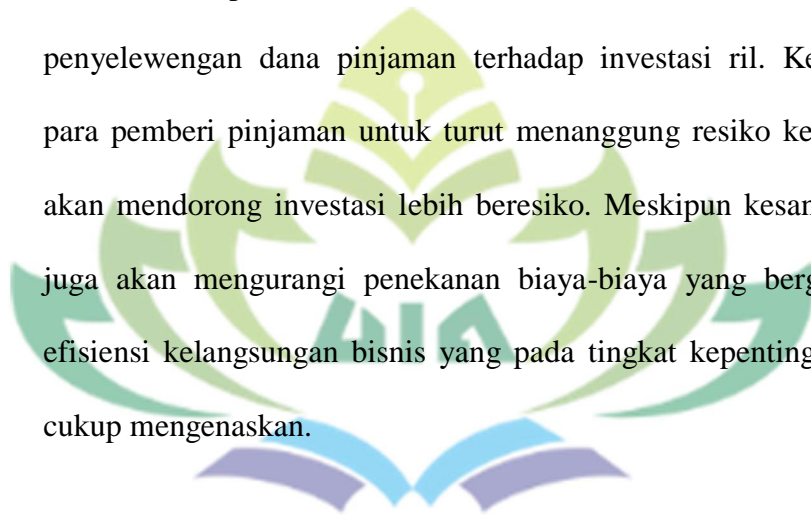
6. Kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis

Dalam dunia bisnis dan industry, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan system bagi hasil tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan pengusaha pengusaha oleh pihak bank dan juga investasi bank terhadap urusan manajemen pengusaha. Keadaan ini sangat berbeda dengan system pembiayaan dengan berdasarkan bunga,

dimana modalnya aman terjaga, pendapatan yang diperoleh secara pasti, dan biaya pinjaman diketahui dengan jelas.

7. Permasalahan efisiensi

Tingkat investasi bagi hasil mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan system lainnya. Karena dalam system bagi hasil diberikan penawaran yang sesuai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan. Oleh karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian usaha yang dibagikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidaktauan hasil produksi, serta tidak ada kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana pinjaman terhadap investasi ril. Kesanggupan para pemberi pinjaman untuk turut menanggung resiko kemungkinan akan mendorong investasi lebih beresiko. Meskipun kesanggupan ini juga akan mengurangi penekanan biaya-biaya yang berguna untuk efisiensi kelangsungan bisnis yang pada tingkat kepentingan tertentu cukup mengenaskan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggraeni, W. (2017). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dan penanganan permasalahannya (studi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung)*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Cendikia.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascaria. (2015). *Akad dan Produk bank dan syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Gunawan, A. (2003). *Kamus Cerdas Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika .
- Hadi, S. (2002). *Metode Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Hangdada, M. A. (2014). *Strategi Pemasaran Produk Mudharabah Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Formes Sleman Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga.
- Haroen, N. (2007). *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Permata.
- Indonesia, D. A. (2008). *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro.
- Indriyanto, N., & Bambang Supomo. (2009). *Metode Penelitian Bisnis* . Yogyakarta: bpfe.
- Ismaail. (2016). *Perbankan syariah*. Jakarta: PT. Charisma Putra Utama.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Januari, S. P. (2019). *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Karim, A. (2014). *Bank Islam analisis feqih dan keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kartono, K. (1998). *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni.
- Lampung, B. B. (2017). *Arsip BPRS Bandar Lampung*. Bandar Lampung: BPRS Bandar Lampung.

- Masyuri, & Zainudin. (2008). *Metode Penelitian Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Adutama.
- Mu'alim, A. (2004). *Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya*. Al-Mawarid Edisi XI.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: Gramedia.
- Nasional, D. S., & Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Himpunan Fatwa DSN-MUI*.
- Nawawi, H. (1998). *Metodelogi Bidang Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Norbuko, C., & Abu, A. (2012). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rahman, A. (2003). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ridwansyah. (2012). *Mengenal Istilah-istilah Dalam Perbankan Syariah*. Bandar Lampung: AURA (Anugrah Utama Raharjo).
- Ridwansyah. (2016). *Selayang Pandang Bank Syariah Bandar Lampung* . Bandar Lampung.
- Rivai, V., & Arifiyan, A. (2010). *Islamic Banking sistem bank Islaam bukan hanya solusi menghadapi krisis namun solusi dalam menghadapi berbagai persoalan perbankan dan ekonomi global*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rodoni, A., & Abdul, H. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sholihin, A. I. (2015). *Ini lho bank syariah memahami bank syariah dengan mudah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarso, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian Pendekatan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumitra, W. (2004). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Kerkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wirdianingsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Jurnal

- Abdullah, S.N. (2013). Analisis fator-fator yang mempengaruhi penghimpunan deposito mudharabah perbankan syariah di indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*.
- Adnan, M. A., & Didi, P. (2013). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan mudharabah menurut perspektif manajemen bank syariah dengan pendekatan kritis. *Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 14 No. 1*, 13-31.
- Agung, Y., & Budiangatus, s. (2016). The internal factors of indonesian sharia banking to predict the mudharabah deposits. *Journal rivew integratif bussines and economics research*.
- Arinal, R., Deni, M., & Jannudin. (2018). Analysis of low realization for mudharabah financing at muamalat Indonesian bank. *Budapest International research critics institute-journal (BIRCI-Journal)*, 215-223.
- Fauziah, M. T., & T, R. (2008). Factors influencing intention to use diminishing partnership home financing. *Internasional Jurnal of Islamic and middle eastern finance and management*.
- Furqaini, N., & Rizal, y. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan Syariah diindonesia. *Jurnal JRAK*.
- Urniawati, a., & Zulfiar. (2014). Anilisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum Syariah diindonesia. *Jurnal auntansi-feb ums*

Muhammad, A. A., & Didi, P. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan mudharabah menurut perspektif manajemen bank Syariah dengan pendekatan kritis. *Jurnal Akuntansi dan investasi*, 14-31.

Novianto, A. S. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi himpunan deposito mudharabah perbankan Syariah di dindonesia. *Jurnal Aplikasi manajemen Vol. 11 No. 4*

Zulfikar, A. K. (2014). Analisis yang mempengaruhi Faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan yang berbasis bagi hasil pada bank berbasis bagi hasil pada bank umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi-feb ums*.

Online

[Http://banksyariahbandarlampung.co.id](http://banksyariahbandarlampung.co.id)

KBBI, K. B. (2019, September 10). *Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*. Retrieved from <https://www.kbbi.web.id/rendah>

KBBI, K. B. (2019, September 17). *Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan)*. Retrieved from <https://www.kbbi.web.id/bank>

Syariah, S. P. (2020, Februari 12). *Islamic Banking Statistik*. Retrieved from <http://www.bi.go.id/UUNo21> Tahun 2008